



Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Rumah Layak Huni Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Guna Menunjang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dias Sekarwati¹, Riko Setya Wijaya²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹sekardias06@gmail.com, ²rico_setyawijaya@yahoo.co.id

Abstract: *The house is a reflection of the life of the community because the house is a place to live where every community can be protected from various weather and diseases. However, the low level of public awareness of proper housing is still very low, this is due to economic factors that make the people themselves indifferent to proper housing. As is well known, sustainable development (SDGs) is an agreement taken by each country to improve the welfare of the community. This study uses a qualitative research method based on a case study approach to determine the role played by the government in improving livable housing to support sustainable economic development. The purpose of this study is to measure how effective the role of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program is in increasing livable housing to support sustainable economic development.*

Keywords: *Decent Home, Role Of Government, SDGs*

Abstrak Rumah merupakan cerminan hidup dari masyarakat, pasalnya rumah merupakan tempat tinggal dimana setiap masyarakat dapat terlindung dari berbagai cuaca dan penyakit. Namun pada dasarnya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hunian yang layak masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang membuat masyarakat sendiri acuh terhadap rumah yang layak. Seperti yang diketahui pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) merupakan kesepakatan yang diambil oleh setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan studi kasus untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan rumah layak huni guna menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur seberapa efektifnya peran dari program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya untuk meningkatkan rumah layak huni guna menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Rumah Layak Huni, Peran Pemerintah, SDGs

PENDAHULUAN

Sustainable Development merupakan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelum Millenium Development Goals berakhir. SDGs sendiri ditetapkan pada september 2015 melaui sidang umum PBB. Tujuan dari SDGs sendiri yaitu untuk menjaga kesejahteraan ekonomi dari masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga kualitas hidup dari masyarakat. Seperti yang kita ketahui masih banyak permasalahan kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan, salah satunya kemiskinan, dimana hal ini selalu menjadi

bayang-bayang yang selalu ada pada setiap negara.

Kemiskinan merupakan suatu faktor yang umum terjadi pada setiap negara. Kemiskinan sendiri merupakan suatu fenomena yang lumrah bagi negara Indonesia karena ancaman mengenai kemiskinan sudah menjadi bayang-bayang yang menghantui pemerintah sejak dulu. Sudah banyak peran yang pemerintah lakukan demi menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun masih banyak faktor lain diluar dari faktor inti yang menjadi bayang-bayang kemiskinan.

Kemiskinan akan selalu menjadi fenomena yang terjadi pada setiap negara. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai faktor seperti lapangan pekerjaan yang sempit, upah pekerja yang kurang, inflasi yang terus menerus naik, dan banyak faktor pendukung lain yang menjadi pendukung dari kemiskinan tersebut. Kota Bogor merupakan suatu kota di Provinsi Jawa Barat yang dimana termasuk dalam kategori pusat perekonomian karena di dukung dengan banyak faktor. Namun kemiskinan masih menjadi bayang-bayang dari kota ini.

Kemiskinan	Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bogor		
	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (,000)	75.04	80.09	79.15
Persentase Penduduk Miskin (%)	6.68	7.24	7.10
Garis Kemiskinan (Rp.,-)	547399.00	571425.00	608949.00
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.08	1.10	1.27
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.26	0.27	0.29

Tabel 1

Sumber : BPS Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk miskin sejak 2020 terus meningkat tajam, hal ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang menghantui dunia. Kemiskinan terus meningkat tajam karena ekonomi dunia lumpuh dimana para pekerja juga banyak sekali yang terdampak dengan pemutusan pekerjaan. Hal ini yang menjadi pendukung bagi kemiskinan yang terjadi.

Rumah merupakan suatu bagian penting dari masyarakat, rumah sendiri merupakan cerminan hidup masyarakat dalam bertempat tinggal. Namun pada dasarnya di Indonesia sendiri masih banyak pemukiman yang dinilai tidak layak dan hal tersebut akan membahayakan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Jika dilihat lebih dalam

masih banyak pemukiman di Indonesia yang di buat hanya sekedar untuk berlindung tanpa memperdulikan faktor kesehatan dan keselamatan dari penghuninya.

Pemerintah merupakan suatu elemen yang dimana berperan penting dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi, kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Peran pemerintah dalam menunjang rumah layak huni bagi masyarakat sangatlah diperlukan bahwasanya cermin dari kemiskinan dan kualitas kesehatan dilihat dari bagaimana cara pemerintah sendiri dalam menanggulangi hal tersebut. Menurut amanah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28H ayat 1, menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman, sehat. Keterbatasan antara masyarakat dalam memenuhi rumah layak huni pada saat ini menjadikan pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan rumah layak huni di Indonesia.

Permasalahan perumahan di Indonesia sendiri sudah terjadi hingga saat ini dan dikenal sebagai backlog atau kekurangan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peran pemerintah dalam peningkatan kualitas rumah juga dapat membantu masalah kemiskinan pada masyarakat, karena rumah merupakan tempat bermukim suatu masyarakat. Jika suatu rumah tidak bisa di jamin tingkat kesehatan dan keselamatan maka hal tersebut akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan kemiskinan yang semakin parah.

Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang layak huni merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang harus di pahami baik keterbatasan dalam tidak mampuan dalam memenuhi ekonomi, mendapatkan hak-hak dasar serta perbedaan dalam mendapatkan perlakuan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi hak dalam memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, rumah yang layak, serta rasa aman terhadap perlakuan sosial dan hak untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan sosial maupun politik yang ada dimasyarakat.

Hal yang menyebabkan masyarakat miskin memiliki keterbatasan yaitu karena susah nya lapangan pekerjaan yang ada, ketidaktetapan dalam segi penghasilan, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki membuat suatu masyarakat pun susah untuk mendapatkan hak atas rumah yang layak huni.

Dalam hal ini pemerintah sudah banyak melakukan cara untuk mengatasi masalah pada permukiman kumuh, diantaranya merelokasikan masyarakat permukiman kumuh kedalam suatu rusun, bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah, dan masih banyak lagi. Bantuan yang sedang di gencarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu salah satunya program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di bawah naungan Ditjen Perumahan merupakan suatu bantuan peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan asas gotong royong. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2022 yang didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan bantuan perumahan dan penyediaan rumah khusus.

Dalam hal menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di salurkan baik berbentuk uang maupun bahan material yang dimana pembelian untuk bahan material sudah diatur dalam teknis pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan harus sudah siap dan mengenal dengan baik program bantuan yang di salurkan oleh pemerintah.

Dalam peningkatan kualitas rumah harus sesuai standar rumah layak yang dimana sudah tertuang dalam ketentuan BSPS sendiri, diantaranya adalah yaitu ketahanan struktur bangunan yang kokoh, akses air minum yang layak, akses sanitasi yang layak. Dimana dalam proses verifikasi juga sudah ditentukan berdasarkan level yang telah ditentukan oleh BSPS sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif dengan pendekatan apapun, peneliti harus lebih memperhatikan serta memahami agar dimana dalam mengungkap sebuah subjek penelitiannya akan lebih tepat dan cocok sehingga hasil dari penelitian dapat sesuai dengan tujuan (Rijal Fadli, 2021).

Pendekatan studi kasus yaitu suatu pendekatan untuk mendeskripsikan suatu latar belakang dari obyek atau suatu peristiwa secara terperinci dan mendalam (Rahardjo, 2017). Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sendiri dipilih karena terdapat kedekatan serta kemudahan dari informasi yang dapat dijangkau oleh peneliti karena adanya keterbatasan antara waktu dan tempat yang dilakukan dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengamati secara langsung objek yang menjadi penelitian. Observasi sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah empiris yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada pada lapangan maupun tulisan, melalui pengalaman

panca indra tanpa manipulasi apapun. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati secara langsung baik aktivitas yang dilakukan oleh kecamatan Bogor Selatan untuk penanggulangan rumah tidak layak huni maupun peran masyarakat akan sadarnya rumah layak huni.

Selain itu penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan sesi tanya jawab kepada informan yang dijadikan objek penelitian. Teknik wawancara merupakan suatu teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data dimana informasi yang telah disampaikan oleh informan dijadikan data penelitian ini. sehingga penelitian ini merupakan peran pemerintah dalam meningkatkan rumah layak huni guna menunjang pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang berdasarkan pada asas gotong royong. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sendiri merupakan bantuan yang dimana untuk meningkatkan kualitas rumah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menurut data RPJMN untuk pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah swadaya pada tahun 2015 tercatat sebanyak 85.00 unit rumah, tahun 2016 mencapai 345.00 unit, tahun 2017 mencapai 400.000 unit, tahun 2018 mencapai 445.000 unit dan pada tahun 2019 telah tercapai sebanyak 475.000 unit. Sehingga total keseluruhan rumah swadaya yang tercatat pada RPJMN sebanyak 1,5 juta unit. Sementara itu target rumah yang telah tercapai pada tenggat 2015-2019 hanya mencapai 662.907 unit rumah sehingga masih banyak kekurangan yang tersisa.

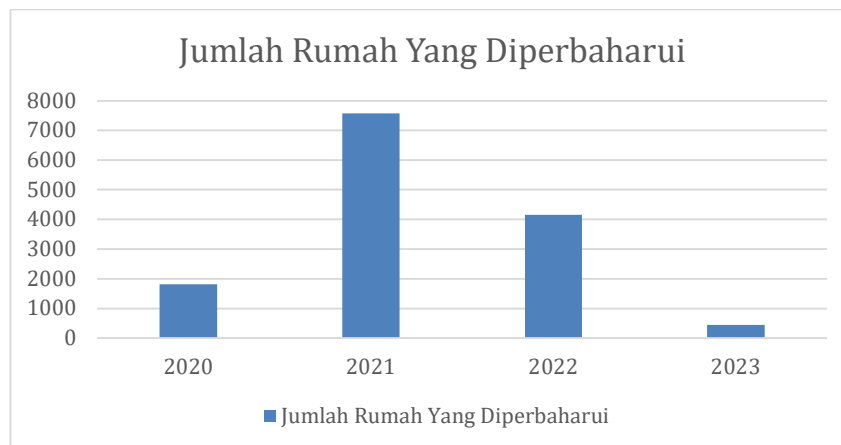


Diagram 1 Jumlah Penerima Program BSPS

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Berdasarkan data diatas, Kota Bogor merupakan daerah dengan serapan BPS yang dimana setiap tahun cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah yang mendapat bantuan prgram BPS. Kesadaran dari masyarakat mengenai Rumah Layak Huni juga membuktikan bahwa mereka dapat memperoleh bantuan untuk memperbaiki kualitas rumah agar mereka mendapatkan hak atas akses rumah yang layak.

Sebelumnya masyarakat di himbau untuk mengerti dengan lebih lanjut mengenai program BPS. Dimana bantuan ini diberikan dengan jumlah Rp 20.000.000 dengan rincian Rp 17.500.000 diberikan dalam bentuk bahan material, Rp 2.500.000 diberikan kepada penerima bantuan secara langsung untuk upah para pekerja. Meskipun begitu masyarakat perlu memperhatikan mengenai ke kokohan dari sebuah bangunan serta akses sanitasi yang layak, dimana sanitasi yang layak menjadikan pemilik dari rumah terhindar dari penyakit.

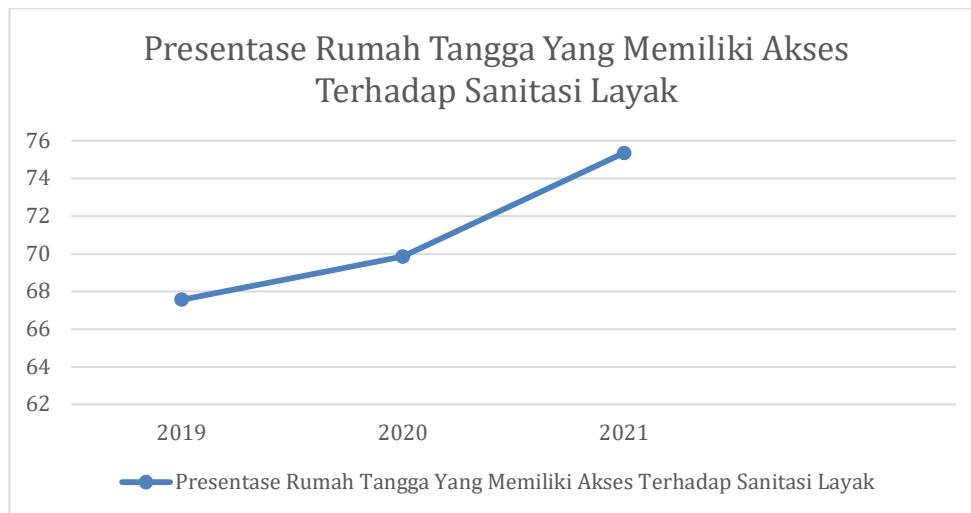


Diagram 2 Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi layak

Sumber : BPS Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak tiap tahunnya meningkat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa program dari BPS dalam peningkatan kualitas rumah dapat menjadi salah satu faktor yang membuat akses sanitasi yang ada di setiap rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan yang cukup baik. Akses sanitasi dapat mempengaruhi kesehatan merupakan faktor pendukung dari masyarakat, dimana sanitasi yang buruk akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Akses sanitasi yang layak merupakan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya untuk mencapai SDGs ini di dukung oleh pemerintah melalui RPJMN 2015-2019, dimana didalam RPJMN sendiri mencakup penyediaan rumah swadaya.

Indonesia telah mampu mencapai target yang diberikan oleh SDGs namun dengan

begitu akses sanitasi masih menjadi persoalan yang masih harus ditingkatkan karena target mengenai akses sanitasi masih belum tercapai sepenuhnya. Namun dengan begitu peran pemerintah masih gencar dalam menghadapi permasalahan tersebut. Lebih lanjutnya penyediaan rumah swadaya tidak hanya berfokus pada struktur bangunan yang kokoh namun harus memperhatikan akses sanitasi yang layak pula, dengan begitu target yang telah ditetapkan untuk SDGs pula dapat tercapai.

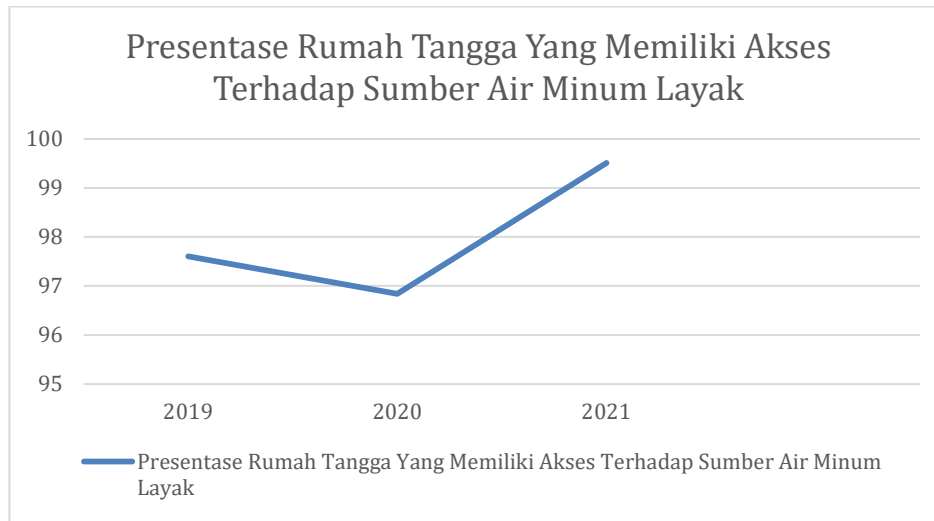


Diagram 3 Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Sumber : BPS Jawa Barat

Berdasarkan data pada diagram, presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak sangatlah bagus, hal ini didukung pula dengan ketersediaan air PDAM yang menyeluruh pada masyarakat Kota bogor sendiri sehingga ketersediaan air minum yang layak tidak menjadi permasalahan yang kompleks namun terus ditingkatkan oleh pemerintah setempat.

Pada awal semester tahun 2023 Kota Bogor memiliki kuota sebanyak 434 unit untuk di perbaiki rumahnya. Hal tersebut telah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kota bogor sendiri, paada kecamatan bogor selatan memiliki total 205 rumah yang lolos dari proses verifikasi rumah layak huni, sebarannya diantaranya sebagai berikut

Kelurahan	Jumlah Penerima Bantuan
Kertamaya	19
Rancamaya	18
Ranggamekar	49
Batu Tulis	5
Muarasari	1

Pamoyanan	36
Bondongan	10
Empang	14
Mulyaharja	24
Genteng	29

Tabel 2 Distribusi Sebaran Program BSPS

Program BSPS yang berjalan pada tahap ini banyak sekali temuan. Dimana akses sanitasi yang kurang, rumah yang benar-benar tidak layak huni, struktur bangunan yang tidak kokoh. Berdasarkan temuan-temuan tersebut banyak masyarakat yang sebenarnya ingin sekali memperbaiki rumah mereka, hanya saja pandemi menyebabkan masyarakat mengalami pemutusan kerja, banyak omset dari masyarakat yang menurun sehingga dari mereka masih berharap akan bantuan dari pemerintah.

Pada dasarnya program BSPS sendiri ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dimana masyarakat berpikir program ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas rumah. Namun masih banyak masyarakat yang mengeluh karena keterbatasan swadaya yang mereka miliki. Kurangnya keterampilan dari para pekerja juga membuat banyak sekali temuan yang tidak sesuai dengan standar BSPS. Ketika ditelusuri lebih lanjut ada beberapa tukang yang tidak mengerti dengan kemampuan dari struktur bangunan. Namun dengan begitu masih banyak hal pula yang merasa puas dengan bantuan yang diterima. Bantuan dari program BSPS ini pula menjadikan masyarakat menjadi lebih sadar akan rumah layak huni, serta memiliki hak atas rumah layak huni.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pada dasarnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi program yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah. Pemerintah banyak memberi dukungan yang baik bagi masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi khususnya ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya berbagai faktor pendukung SDGs setiap tahunnya.

Program BSPS sendiri masih banyak kekurangan didalamnya, dimana program ini ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) namun masih banyak hal yang tidak tepat termasuk proses verifikasi keswadayaan masyarakat. Dimana masyarakat juga masih wajib berswadaya untuk meningkatkan kualitas rumah mereka, sementara masih banyak masyarakat yang rumahnya bisa di kategorikan sebagai tidak layak tidak lolos proses verifikasi karena ketidakmampuan dari masyarakat sendiri untuk berswadaya. Selain itu keterampilan

dari para pekerja masih banyak yang tidak sesuai dengan standar program, BSPS sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Asnawi, R., Kindangen, P., & Engka, D. (2020). PENGARUH PENDIDIKAN, PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PROGRAM RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 109-126.
- Iping, B. (2020). PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 516-526.
- Khoirunnisa, N., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Sector Inovation*, 1-7.
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11-16.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. 1-26.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 77-90.
- Ramdani, F. T., Zenju, N. S., & Luthfie, M. (2018). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI MASYARAKAT KOTA BOGOR PADABAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYATSETDA KOTA BOGOR. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 1, 39-47.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami Deain metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 33-54.
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2019). Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Serang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1-6.
- Winarno, B. (2018). EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG. *Jurnal Pengembangan Kota*, 66-74.